

## **EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENDORONG INKLUSI SOSIAL: TINJAUAN DARI PRESFEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK**

Tiara Melati<sup>1</sup>, Sulikah Asmorowati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Corresponding Author: [tiara\\_melati2022@fisip.unair.ac.id](mailto:tiara_melati2022@fisip.unair.ac.id)<sup>1</sup>,

[sulikhah.asmorowati@fisip.unair.ac.id](mailto:sulikhah.asmorowati@fisip.unair.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Dalam era modern ini, kebijakan publik yang mendorong inklusi sosial telah menjadi perhatian penting bagi banyak negara dan pemerintahan daerah. Upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan keadilan bagi semua warganya menjadi fokus utama dalam pembentukan kebijakan ini. Melalui langkah-langkah konkret dan strategis, kebijakan publik dapat berperan sebagai penggerak dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan publik berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya dalam mendorong inklusi sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BPNT telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan inklusi sosial di Kelurahan Bendulmerisi. Namun, terdapat aspek yang perlu dievaluasi yakni pendataan warga yang berhak menerima bantuan dan sosialisasi yang lebih efektif mengenai penggunaan KPM.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Kebijakan Publik, Inklusi Sosial

### **Abstract**

*In this modern era, public policies that promote social inclusion have become a significant concern for many countries and local governments. Efforts to reduce social inequality and ensure fairness for all citizens are the primary focus in the formulation of these policies. Through concrete and strategic steps, public policies can play a pivotal role in creating an inclusive society, where every individual has equal opportunities to participate and benefit from development. This research aims to evaluate the implementation of a public policy, namely the Non-Cash Food Assistance (BPNT), in Bendulmerisi Village, Wonocolo District, Surabaya City, in promoting social inclusion. The research methodology used is descriptive with a qualitative approach, employing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The findings of the study indicate that the implementation of BPNT policy has yielded positive impacts in enhancing social inclusion in Bendulmerisi Village. However, there are aspects that need to be evaluated, such as the accurate registration of eligible recipients and the need for more effective socialization regarding the utilization of the Beneficiary Card (KPM).*

**Keywords:** Evaluation, Public Policy, Social Inclusion

#### **History:**

Received : 19 June 2023

Revised : 20 June 2023

Accepted : 24 June 2023

Published: 28 June 2023

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



## **Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam konteks yang lebih sempit, kemiskinan mengacu pada keadaan ketika individu tidak memiliki cukup uang tunai dan barang dagangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, dalam perspektif yang lebih luas, kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi kompleks yang melibatkan berbagai aspek. Kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan penduduk suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesejahteraan, dan kesempatan kerja (Mulia, 2022)

Menurut data Bank Dunia, kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan ketika seseorang hidup dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan yang ditentukan. Namun, kemiskinan bukan hanya tentang pendapatan rendah. Para ahli sepakat bahwa kemiskinan juga melibatkan akses terbatas terhadap pendidikan, perumahan layak, pelayanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Faktor-faktor struktural seperti ketimpangan ekonomi, kurangnya kesempatan, dan kebijakan yang tidak inklusif juga berperan dalam mempertahankan dan memperluas kesenjangan kemiskinan. Salah satu pendapat ahli adalah bahwa kemiskinan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling terkait. (Dawami et al., 2021), seorang ekonom dan penerima Hadiah Nobel dalam bidang Ekonomi, mengemukakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh ketidakadilan sosial, ketidakmerataan distribusi sumber daya, dan kurangnya kesempatan yang setara. Pendekatan ini menekankan pentingnya memperhatikan faktor-faktor struktural dan kesenjangan dalam upaya mengatasi kemiskinan.

Selain itu, perlu dilakukannya pendekatan holistik dalam memerangi kemiskinan. (Rasdi & Kurniawan, 2019), berpendapat bahwa perlu adanya upaya yang terkoordinasi dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengatasi berbagai aspek kemiskinan secara simultan dan berkelanjutan. Namun, penting untuk mencatat bahwa kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multi-dimensi, dan pendapat para ahli tidak selalu homogen. Berbagai faktor seperti konteks sosial, politik, dan ekonomi masing-masing negara juga perlu diperhitungkan dalam memahami dan mengatasi kemiskinan. Pendapat para ahli ini memberikan wawasan dan pandangan penting dalam memahami kemiskinan. Namun, perlu diingat bahwa pendekatan yang holistik dan terpadu serta tindakan konkret dari pemerintah, masyarakat sipil, dan aktor terkait lainnya diperlukan untuk mengatasi akar masalah kemiskinan secara efektif.

Di negara Indonesia sendiri telah banyak kebijakan yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan kesenjangan sosial yang terjadi dikalangan masyarakat. Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong inklusi sosial di Indonesia. Hal ini

dilakukan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permensos RI Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai adalah jenis bantuan non tunai yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan. Pencairan dana hanya dapat dilakukan di tempat yang telah bekerjasama dengan Bank penyalur atau di Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong). BPNT merupakan program bantuan pangan yang menggunakan mekanisme non tunai, di mana bantuan pangan diberikan kepada keluarga miskin melalui kartu elektronik atau e-warung. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan pangan tepat sasaran, mengurangi kesenjangan sosial, serta memberikan akses yang lebih mudah dan layanan yang lebih terjangkau bagi keluarga yang membutuhkan. Dalam konteks inklusi sosial, BPNT memiliki potensi besar untuk meningkatkan aksesibilitas, pilihan, dan kemandirian bagi penerima bantuan. Dengan menggunakan kartu elektronik, keluarga miskin dapat memilih makanan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, tanpa harus terikat pada paket bantuan pangan yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini memberikan ruang bagi mereka untuk menjaga keberagaman pangan dan mempertahankan budaya serta kebiasaan makanan mereka.

Selain itu, BPNT juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan pangan. Penggunaan teknologi dalam program ini memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap data penerima bantuan dan penggunaan kartu. Dengan demikian, penyalahgunaan dan korupsi dalam program bantuan dapat diminimalkan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian tentang evaluasi kebijakan publik berupa BPNT dalam mendorong inklusi sosial dengan tinjauan dari prespektif kebijakan publik dengan studi kasus yang dilakukan di Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Lokasi tersebut dipilih atas pertimbangan bahwa Kelurahan Bendulmerisi merupakan salah satu daerah yang masuk dalam program kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai dari pemerintah. Sebanyak 250 KPM yang tersebar di 12 RW 58 RT di wilayah Kelurahan Bendulmerisi menerima bantuan dari pemerintah dengan jumlah nominal bantuan sebesar Rp500.000,- untuk tiga bulan bantuan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode berlandaskan pada filsafat positivisme, tujuannya untuk melakukan penelitian terhadap populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan

(Sugiyono, 2018)). Selain itu menurut (Nurlan, 2019) bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan kekuatan dalam mengumpulkan data yang dapat diukur secara konsisten dan memungkinkan analisis statistik yang mendalam. Mereka menyatakan, "Penelitian kuantitatif memberikan kerangka kerja yang sistematis dan objektif untuk mengeksplorasi fenomena yang dapat diamati dan diukur."

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut (Ni'matuzahroh & Prasetyaningrum, 2018), Observasi dapat memberikan data yang akurat dan kontekstual tentang perilaku, interaksi, dan situasi yang diamati. Jupp menyatakan, "Observasi langsung memberikan wawasan yang mendalam tentang situasi atau kejadian yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara atau sumber data lainnya." Kemudian yang dimaksud dengan "wawancara" menurut Kvale (1996), wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan perspektif responden. Kvale menjelaskan, "Melalui wawancara, peneliti dapat mendapatkan penjelasan mendalam tentang pikiran, motivasi, nilai-nilai, dan pengalaman individu." Selanjutnya, Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen tertulis, catatan, laporan, atau arsip yang relevan dengan penelitian atau evaluasi. Menurut (Yusuf Perdana et al., 2019), Dokumentasi dapat memberikan data historis, kontekstual, dan objektif yang dapat mendukung analisis dan interpretasi. (Yusuf Perdana et al., 2019) menyatakan, "Dokumentasi dapat mencakup berbagai jenis materi, seperti dokumen resmi, catatan pertemuan, memo internal, laporan publik, atau sumber data lainnya."

## **Hasil Dan Pembahasan**

Evaluasi kebijakan publik adalah proses penting untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan yang telah diterapkan. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan publik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kebijakan ini mendorong peningkatan inklusi sosial di tingkat kelurahan. (Angeline & Sulandari, 2020), mengemukakan lima kriteria evaluasi kebijakan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi keberhasilan sebuah kebijakan publik yakni Efektifitas, Efisiensi, Keadilan, Kepuasan Publik dan Dampak Jangka Panjang. Evaluasi dalam penelitian ini akan mengimplementasikan lima kriteria evaluasi tersebut untuk dapat memahami bagaimana hasil evaluasi kebijakan publik berpengaruh dalam mendorong peningkatan inklusi sosial.

### **1. Efektifitas**

Efektifitas merupakan kriteria evaluasi yang menyoroti sejauh mana kebijakan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas mencakup pertanyaan apakah kebijakan menghasilkan hasil yang diinginkan dan apakah tujuan-tujuan tersebut

tercapai dengan efisien. Dalam konteks kebijakan publik berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), evaluasi dapat melihat sejauh mana kebijakan ini berhasil menyediakan bantuan pangan yang memadai kepada keluarga miskin di Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Analisis yang dilakukan melibatkan pengukuran partisipasi masyarakat dalam program BPNT, tingkat keterjangkauan bantuan pangan, dan pemenuhan kebutuhan dasar pangan keluarga penerima manfaat. Data survei dan wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai tingkat kepuasan dan dampak program BPNT pada kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Terdapat 2 aspek penting yang terkandung dalam efektifitas sebagai kriteria dalam mengevaluasi kebijakan, yakni adanya hasil yang sesuai dengan tujuan diterapkannya kebijakan dan tercapainya dampak baik dari penerapan kebijakan publik yang dalam konteks penelitian ini yakni kebijakan pemberian BPNT.

### **Adanya Hasil yang Sesuai dengan Tujuan Kebijakan**

Berdasarkan data dari hasil observasi yang dilakukan di Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, mengenai hasil yang dirasakan masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan pemberian BPNT menunjukkan bahwa hasil yang dirasakan oleh masyarakat masih belum optimal karena masih ada beberapa masyarakat yang kurang mampu tetapi belum mendapatkan bantuan BPNT yang juga diindikasikan terjadi kesalahan dalam pendataan warga kurang mampu dan warga yang sebenarnya mampu tetapi mendapat bantuan BPNT. Dalam menghadapi masalah ini masyarakat ikut berpartisipasi menyuarakan suara terhadap para pejabat Kelurahan untuk melakukan tinjauan langsung terhadap para penerima bantuan agar dapat memeriksa secara langsung demi tercapainya bantuan sesuai dengan masyarakat yang berhak menerimanya.

Di sisi lain, observasi juga mencatat adanya hasil berupa peningkatan partisipasi masyarakat penerima BPNT dalam kegiatan ekonomi lokal. Bantuan pangan non tunai memberikan keluarga miskin kesempatan untuk berbelanja di pasar-pasar lokal dan memberdayakan para pedagang setempat. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan interaksi sosial antara keluarga miskin penerima BPNT dan komunitas sekitar.

### **Tercapainya Dampak Baik dari Kebijakan**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengungkapkan bahwa kebijakan BPNT telah memberikan efek positif dalam membangun rasa solidaritas dan saling peduli antara warga kelurahan. Program ini mendorong kolaborasi dan gotong royong di antara warga kelurahan untuk memastikan distribusi yang adil dan efektif dari bantuan pangan. Meskipun dalam praktiknya masih belum mencapai hasil yang maksimal terkait target penerima bantuan BPNT, Masyarakat tetap saling membantu

dalam memahami proses pendaftaran, penggunaan kartu BPNT, dan memastikan keluarga miskin yang membutuhkan mendapatkan manfaat yang seharusnya.

Dampak baik yang muncul dari program ini mendorong terjadinya peningkatan inklusi sosial di mana masyarakat aktif ikut serta dalam kegiatan mensukseskan program kebijakan pemerintah. Selain itu, masyarakat juga aktif meyuarkan suara perihal pengajuan pendataan ulang mengenai warga yang berhak untuk mendapatkan bantuan BPNT ini. Di sisi kegiatan ekonomi pun, dampak yang diberikan dari implementasi program kebijakan ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal. Hal ini juga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan interaksi sosial antara keluarga penerima BPNT dan komunitas sekitar.

## **2. Efisiensi**

Kriteria ini menilai penggunaan sumber daya dalam implementasi kebijakan. Efisiensi mencakup pertanyaan apakah kebijakan dilaksanakan secara hemat, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Hasil dari data observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam mendorong inklusi sosial di Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya juga mencapai kriteria efisiensi. Data observasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BPNT dilakukan secara efisien dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan baik.

Melalui observasi, dapat diamati bahwa proses distribusi bantuan pangan non tunai dilakukan secara teratur dan efektif. Program penyaluran bantuan dilakukan oleh pejabat kelurahan berjalan dengan aman dan lancar. Warga yang berpartisipasi pun menjalankan kegiatan penerimaan bantuan dengan kondusif. Keluarga miskin di Kelurahan Bendulmerisi menerima Kartu Penerima Manfaat (KPM) yakni kartu elektronik di mana dana BPNT masuk dan dapat menggunakannya dengan mudah saat berbelanja kebutuhan pangan di toko-toko yang bekerjasama maupun melakukan tarik tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan BPNT telah berhasil mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dalam implementasinya.

Selain itu, hasil dokumentasi dari pihak terkait program BPNT juga mengungkapkan bahwa proses administrasi dan pengelolaan kebijakan ini berjalan dengan baik. Pendaftaran, verifikasi, dan pemantauan peserta dilakukan secara efisien dan tepat waktu. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara masih menunjukkan adanya kekurangan dalam hal pendataan warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan. Dalam kasus ini terdapat beberapa warga yang berpendapat adanya warga dengan ekonomi mampu yang juga ikut menerima bantuan BPNT. Namun, masih ada juga di luar sana warga miskin yang tidak mendapatkannya.

Kombinasi data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi memberikan bukti bahwa kebijakan BPNT di Kelurahan Bendulmerisi memiliki efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Pendistribusian bantuan pangan dilakukan dengan efisien, pengelolaan administrasi program berjalan baik, tetapi masih ada kekurangan di bagian pendataan warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan masih belum optimal.

Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan nilai efisiensi program bantuan ini yakni dengan melakukan peninjauan ulang mengenai data warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan sehingga target penerima bantuan bisa tersalurkan secara optimal dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

### **3. Keadilan**

Kriteria ini mempertimbangkan sejauh mana kebijakan memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan distribusi yang adil. Keadilan mencakup pertanyaan apakah kebijakan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak yang terlibat. Hasil dari data observasi, wawancara, dan dokumentasi mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah berhasil mendorong inklusi sosial di Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, terdapat beberapa isu yang menunjukkan bahwa kriteria keadilan masih belum optimal. Data observasi menunjukkan bahwa meskipun bantuan pangan non tunai telah tersedia bagi keluarga miskin, masih ada beberapa keluarga kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan dan ada juga keluarga mampu yang mendapat bantuan. Selain itu masih terdapat beberapa masyarakat penerima BPNT yang mengalami kesulitan dalam mengakses dan memahami mekanisme penggunaan kartu KPM. Beberapa responden dalam wawancara juga menyampaikan bahwa informasi yang diberikan mengenai program BPNT belum cukup jelas dan komprehensif, sehingga ada ketidakpastian dan kebingungan dalam penggunaan kartu tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang dapat mempengaruhi keadilan akses terhadap bantuan.

Meskipun program BPNT telah memberikan manfaat kepada keluarga miskin, kebijakan ini perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan untuk meningkatkan kriteria keadilan. Dalam hal ini, pendekatan yang lebih komprehensif dalam memberikan informasi kepada peserta program, serta peningkatan pelayanan informasi, dalam konteks ini, para aparatur kelurahan harus mampu mengedukasi masyarakat dengan menyesuaikan tingkat pemahaman di kalangan masyarakat mengenai mekanisme penggunaan kartu KPM. Dalam rangka mendorong inklusi sosial yang lebih luas, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk terus memantau dan mengevaluasi kebijakan BPNT, serta melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar kriteria keadilan dapat tercapai secara lebih optimal.

#### **4. Kepuasan Publik**

Kepuasan Publik merupakan kriteria yang melibatkan penilaian terhadap kepuasan dan tanggapan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Kepuasan publik mencakup pertanyaan apakah kebijakan mendapatkan dukungan dan persetujuan dari masyarakat yang terkena dampak kebijakan. Hasil dari data observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah mencapai kriteria kepuasan publik yang relatif optimal di Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Namun, terdapat aspek-aspek yang perlu dievaluasi dan diperbaiki terkait pendataan warga dan sosialisasi penggunaan Kartu Penerima Manfaat (KPM).

Data observasi menunjukkan bahwa mayoritas warga yang menerima bantuan pangan non tunai merasa puas dengan kebijakan ini. Mereka mengungkapkan bahwa adanya bantuan tersebut telah membantu memenuhi kebutuhan pangan mereka dengan lebih mudah dan teratur. Wawancara juga mengungkapkan adanya perasaan terbantu dan dihargai oleh pemerintah melalui program BPNT.

Namun, observasi juga mengungkapkan adanya kekurangan dalam proses pendataan warga yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Terdapat beberapa keluarga miskin yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan meskipun memenuhi kriteria yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam proses pendataan untuk memastikan bahwa semua keluarga miskin yang membutuhkan dapat teridentifikasi dan menerima bantuan yang seharusnya.

Selain itu, wawancara juga mengungkapkan bahwa masih ada beberapa warga yang belum sepenuhnya memahami dan teredukasi mengenai penggunaan Kartu Penerima Manfaat (KPM). Beberapa responden mengaku kesulitan dalam menggunakan kartu tersebut saat berbelanja di toko. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada warga mengenai cara penggunaan kartu dan manfaat yang dapat diperoleh melalui program BPNT.

Dalam rangka meningkatkan kepuasan publik, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam pendataan warga serta peningkatan sosialisasi penggunaan KPM. Proses pendataan harus lebih akurat dan inklusif, sehingga tidak ada keluarga miskin yang terlewatkan dalam menerima bantuan. Selain itu, sosialisasi yang efektif perlu dilakukan secara berkala dan menyeluruh agar seluruh warga memahami dengan baik cara penggunaan kartu dan manfaat dari kebijakan BPNT.

Dengan evaluasi dan perbaikan yang tepat, diharapkan kebijakan BPNT dapat mencapai kepuasan publik yang lebih optimal di Kelurahan Bendulmerisi. Pendataan yang akurat dan sosialisasi yang efektif akan membantu memastikan bahwa bantuan pangan non tunai dapat diakses dengan mudah dan memberikan manfaat yang maksimal bagi keluarga miskin, sehingga inklusi sosial dapat tercapai secara lebih luas dan berkelanjutan.



## **5. Dampak Jangka Panjang**

Kriteria Dampak Jangka Panjang mengevaluasi konsekuensi jangka panjang dari kebijakan. Dampak jangka panjang mencakup pertanyaan apakah kebijakan memiliki dampak positif yang berkelanjutan dan mampu menciptakan perubahan sosial yang signifikan dalam jangka waktu yang lebih luas. Berdasarkan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya telah memberikan dampak jangka panjang yang signifikan dalam mendorong peningkatan inklusi sosial.

Data observasi menunjukkan bahwa adanya kebijakan BPNT telah memberikan akses yang lebih mudah dan teratur terhadap uang no tunai untuk keperluan pangan bagi keluarga miskin di kelurahan tersebut. Dengan menerima bantuan pangan non tunai, keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka secara lebih konsisten, membantu mereka keluar dari kondisi kelaparan dan kekurangan gizi. Hal ini berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Selain itu, wawancara dengan peserta program BPNT juga menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memberikan mereka rasa aman dan perlindungan sosial. Mereka merasa diakui dan diberdayakan oleh pemerintah melalui bantuan yang diterima. Dampak psikologis ini penting dalam membangun martabat dan integrasi sosial bagi keluarga miskin, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan inklusi sosial.

Dokumentasi juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BPNT telah mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam program-program sosial dan kegiatan di kelurahan. Melalui pemberdayaan dan pembelajaran yang diberikan kepada peserta, mereka menjadi lebih aktif dan berperan dalam komunitas mereka. Ini menciptakan iklim inklusif di Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, di mana partisipasi aktif dari keluarga miskin dan komunitas secara keseluruhan menjadi norma.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan BPNT di Kelurahan Bendulmerisi memiliki dampak jangka panjang yang signifikan dalam mendorong inklusi sosial. Dampak ini mencakup peningkatan akses pangan yang teratur, perlindungan sosial, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan keluarga miskin, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial. Melalui kebijakan ini, tercipta lingkungan yang inklusif di mana keluarga miskin dapat merasa dihargai, didukung, dan terlibat dalam komunitas mereka.

## **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya dalam mendorong inklusi sosial, dapat diambil beberapa kesimpulan

penting. Pertama, kebijakan BPNT telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan inklusi sosial di Kelurahan Bendulmerisi. Melalui bantuan pangan non tunai, keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan pangan secara lebih konsisten, mengurangi risiko kelaparan, dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan mereka. Kedua, kebijakan ini juga memberikan perlindungan sosial dan rasa aman bagi keluarga miskin. Mereka merasa diakui dan diberdayakan oleh pemerintah melalui bantuan yang diterima, yang berdampak positif pada peningkatan martabat dan integrasi sosial mereka. Ketiga, implementasi kebijakan BPNT telah mendorong peningkatan partisipasi aktif keluarga miskin dalam program-program sosial dan kegiatan di kelurahan. Hal ini menciptakan iklim inklusif di mana partisipasi dan kontribusi dari seluruh komunitas menjadi norma. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki. Evaluasi terhadap kriteria keadilan menunjukkan adanya kesenjangan dalam pendataan warga dan pemahaman terhadap penggunaan Kartu Penerima Manfaat (KPM). Peningkatan dalam pendataan yang akurat dan inklusif, serta sosialisasi yang lebih efektif mengenai penggunaan KPM perlu dilakukan untuk memastikan keadilan akses dan manfaat yang diperoleh oleh keluarga miskin. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kepuasan publik, perbaikan dalam pendataan, sosialisasi, dan pemahaman mengenai program BPNT perlu terus dilakukan. Dengan adanya evaluasi yang berkala dan perbaikan yang tepat, diharapkan implementasi kebijakan BPNT di Kelurahan Bendulmerisi dapat semakin optimal dalam mendorong inklusi sosial dan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin. Kesimpulannya, implementasi kebijakan BPNT di Kelurahan Bendulmerisi memberikan dampak positif dalam meningkatkan inklusi sosial. Meskipun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, evaluasi dan perbaikan yang dilakukan dapat membantu mencapai keadilan yang lebih optimal. Dengan adanya kebijakan yang efektif dan partisipasi aktif dari seluruh komunitas, diharapkan inklusi sosial dapat terus meningkat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi keluarga miskin di kelurahan tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Angeline, A., & Sulandari, S. (2020). *EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)/06/ADM. PUBLIK/2020*. Faculty of Social and Political Science.
- Dawami, H., Buchori, S. H. I., & Sh, M. (2021). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN BERAU PERIODE 2011-2020*.
- Mulia, R. A. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 22–33.

- Ni'matuzahroh, S., & Prasetyaningrum, S. (2018). *Observasi: teori dan aplikasi dalam psikologi* (Vol. 1). UMMPress.
- Nurlan, F. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif*. CV. Pilar Nusantara.
- Rasdi, D., & Kurniawan, T. (2019). Efektivitas Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5(2).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. BANDUNG : Alfabeta,CV.
- Yusuf Perdana, Y. P., Sumargono, S., & Valensy Rachmedita, V. R. (2019). Integrasi Sosiokultural Siswa Dalam Pendidikan Multikultural Melalui Pembelajaran Sejarah. *Integrasi Sosiokultural Siswa Dalam Pendidikan Multikultural Melalui Pembelajaran Sejarah*, 8(2), 79–98.